
PEMBANGUNAN DAN FEMINISASI TANAH DI INDONESIA

(KAJIAN EKOFEMINISME GLOBAL)

Mardian Sulistyati

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

E-mail: dianmakruf@gmail.com

Abstract. *Until now, the development process in most Third World countries including Indonesia still places women as second-class citizens; while leaving a latent environmental crisis problem. This paper examines the influence of development practices through the face of mining corporations, and examines the experiences of the struggles of the people who are in the circle of power relations. The global ecofeminism approach of Vandana Shiva and Maria Mies is used as a linguistic nomenclature that helps explain each of the key words in concepts that have previously been tendered by the patriarchal power system. In the end, the value of ecofeminism as the ethics of life becomes a solutive choice to restore traditional and relational awareness that transcends the binary barriers of the human genitals, and transcends the boundaries of human egoism towards non-humans.*

Keywords: *global ecofeminism; developmetism; mining; Kendeng; Mollo*

Abstrak. Hingga kini, proses pembangunan di sebagian besar negara Dunia Ketiga termasuk Indonesia masih menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua; sekaligus menyisakan problem krisis lingkungan yang laten. Tulisan ini mengkaji pengaruh praktik pembangunanisme melalui wajah korporasi tambang, serta mengkaji pengalaman perjuangan masyarakat yang berada di dalam lingkaran relasi kuasa tersebut. Pendekatan ekofeminisme global Vandana Shiva dan Maria Mies digunakan sebagai nomenklatur linguistik yang membantu memaparkan setiap kata kunci dalam konsep-konsep yang sebelumnya telah tergenderkan oleh sistem kuasa patriarki. Pada akhirnya, nilai ekofeminisme sebagai etika kehidupan menjadi pilihan solutif untuk mengembalikan kesadaran tradisional dan relasional yang melampaui sekat-sekat biner kelamin manusia, serta melampaui sekat egoisme manusia terhadap non-manusia.

Kata Kunci: ekofeminisme global; pembangunanisme; pertambangan; Kendeng; Mollo

Permalink/DOI: <https://doi.org/10.15408/harkat.v14i2.12812>

Pendahuluan

Indonesia telah melalui proses pembangunan yang signifikan, yang konon sebagai upaya sistematis menjamin hegemoni pemerintahan. Stabilitas dan ketertiban adalah landasan dikembangkannya berbagai program pembangunan dan industri yang ambisius. Satu hal yang acapkali luput, bahwa pembangunan berpacu ke dua arah yang paradoksal. Di satu pihak, pembangunan bergerak memenuhi kebutuhan manusia, mendorong maksimalisasi cara berpikir, serta mendatangkan keuntungan materiil bagi siapa saja yang memanfaatkannya. Sementara di lain pihak, pembangunan secara nyata memberi dampak krisis ekologi yang kemudian memberi dampak pada kehidupan perempuan.

Dalam perjalanan advokasinya, WALHI merilis catatan bencana ekologis yang tersebar di seluruh Indonesia selama tahun 2016. Bahwasanya, tercatat 2.342 kejadian bencana atau naik 35 persen dibanding tahun 2015. Bencana tersebut, 92 persennya adalah bencana hidrometeorologi yang didominasi 766 banjir, 612 longsor, 669 puting beliung, 74 kombinasi banjir dan longsor, 178 kebakaran hutan dan lahan, 13 gempa, 7 gunung meletus, dan 23 gelombang pasang dan abrasi. Catatan jumlah korban pun meningkat dari 101 orang pada tahun 2015 menjadi 123 orang pada tahun 2016 (WALHI, 2016). Bencana ekologis sepanjang tahun 2016 tersebut, melalui pembacaan meteorologi dan geofisika, diakibatkan oleh kondisi atmosfer yang tidak sehat sehingga iklim global menjadi begitu labil dengan perubahan-perubahan cuaca yang ekstrem. Analisis ini senada dengan analisis bencana pada tahun 2015 yang memuara pada faktor pengabaian daya dukung lingkungan dalam pembangunan dan pengelolaan alam yang sangat tidak ramah dan berkelanjutan (WALHI, 2015).

Selain problem ekologi, program pembangunan yang selama ini diterapkan minim

dalam memperhatikan kualitas hidup pedesaan dan rakyat desa, termasuk perempuan dan kelompok marginal lainnya. Perluasan usaha-usaha sektoral skala besar seperti perkebunan, pertambangan, dan industri, secara potensial mengakibatkan krisis pangan dan krisis ruang hidup rakyat. Kemudian, berujung kepada pemiskinan: matinya basis- basis produksi dan konsumsi. Akses rakyat terhadap tanah sebagai sumber penghidupan semakin tergerus disertai penghancuran dan pengabaian produksi alamiah yang banyak dikelola perempuan maupun para petani kecil. Pada akhirnya, kondisi krisis seperti inilah yang memicu munculnya beragam bentuk kekerasan dan ketidakadilan berbasis gender.

Dari sini isu lingkungan dan gender semakin gencar bermunculan. Asumsinya, penyebab kegagalan ideologi pembangunanisme adalah absensi perempuan di dalamnya. Berkaca dari banyak studi kasus baik di Indonesia maupun di negara lain, berbagai regulasi yang idealnya mampu mengikat secara kolektif dan menjadi dasar dilaksanakannya pembangunan yang responsif gender, terencana, dan berkelanjutan, pada kenyataannya tidak berjalan sempurna. Perempuan hadir dan berperan, namun kemudian kontribusi mereka —dilupakan dan —dihapuskan pada saat narasi dibentuk (Burnier, 2005: 394-400; Miller, 2009: 43-50; Bearfield, 2009: 383-86; Ramdhon, 2013: 209-18). Adapun konsep perempuan yang disinergikan ke dalam ideologi pembangunanisme yang selama ini diterapkan, pada kenyataannya hanya sebagai strategi arus utama pembangunanisme dalam mendomestikasikan perempuan ketimbang membebaskannya (Fakih, 2013: 60; Rismawati, 2012: 56-63; Goetz, 1994: 27-36), baik melalui upaya pengarahannya/ *cooptation* maupun pengkekangannya/ *regulation* (Ollenburger & Moore, 1998, 65).

Berbagai penetrasi pembangunan dan modernisasi dalam wajah industrialisasi yang

selama ini terjadi, semakin membuat perempuan kehilangan ruang untuk mengartikulasikan kepentingan-kepentingannya. Padahal jelas, perempuan adalah subjek utama yang selalu dibutuhkan untuk hadir. Tulisan ini, adalah upaya untuk memaknai kembali pengalaman-pengalaman perjuangan perempuan yang berada di dalam lingkaran relasi kuasa tersebut. Pendekatan ekofeminisme digunakan sebagai nomenklatur linguistik yang membantu memaparkan setiap kata kunci dalam konsep-konsep yang sebelumnya tergenderkan namun samar untuk disadari.

Maskulinitas Pembangunanisme

Diilhami penuh oleh semangat pencerahan (*enlightment*), pembangunanisme hadir sebagai penanda mulai ditinggalkannya era fatalisme. Bahwa sejatinya manusia selalu bergerak dari posisi kemandekan (*decay*) menuju kemajuan (*progress*) yang ditandai dengan pengetahuan (*rationality*), kemakmuran (*economy*), dan kebebasan (*liberty*) (Rostow, 1990: 4-16). Kesadaran dan upaya untuk bangkit dari situasi kemandekan inilah yang melahirkan konsep-konsep modernisasi. Maka pembangunan, merujuk kepada rumus *the five stage scheme*-nya Rostow, dimaknai sebagai proses perubahan dari kondisi/masyarakat tradisional (*primitive*) menuju kondisi/masyarakat yang modern (*complex*), yaitu yang lebih baik (*betterment*) dan lebih makmur (*prosperity*). Kesadaran ini pula yang kemudian membentuk polarisasi konsep antara negara maju dan negara berkembang dan/atau terbelakang (Preston, 1986: 86-8; Muthmainnah, 2008: 315-31;

Nisbet, 2009: 27-8).

Bila pembangunan ala modernis tersebut berhasil mengatasi keterbelakangan dan stabilitas ekonomi di negara-negara asalnya yakni Amerika dan Eropa, tidak demikian di negara-negara

berkembang. Pengadopsian mentah-mentah corak modernis dalam pembangunan yang banyak dilakukan oleh negara-negara berkembang—yang notebene baru terbentuk pasca-Perang Dunia II, faktanya justru memunculkan banyak persoalan dan keterbelakangan (Pillay, 2015: 59-75; Park, 2015: 1-27; Moore, 2015: 1-43). Walaupun konon, yang paling dicemaskan dari gagasan modernisasi bukan kegagalannya melainkan keberhasilannya: mengantarkan dunia kepada perspektif tunggal yang berpotensi menghancurkan peradaban manusia (*genocide*). Pembangunanisme ala modernis selama ini tidak hanya merupakan transformasi fisik dari negara maju ke negara berkembang, tetapi juga sebagai media utama penyebaran nilai dan pesan yang seringkali kontraproduktif dengan nilai dan budaya lokal negara berkembang.

Sejak tiga dasawarsa ke belakang, telah muncul kesadaran-kesadaran bahwa ada kekeliruan laten dalam paradigma dan kebijakan pembangunan di berbagai negara di dunia. Paradigma dan pola pembangunan yang selama ini diterapkan bersifat dominan- negatif, yang menganggap pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya hal paling utama dalam pembangunan bangsa. Paradigma ini abai terhadap keberlangsungan- keberlanjutan lingkungan hidup termasuk aspek sosial-budaya lokal (Keraf, 2010a: 192- 9; Keraf, 2010b: 84-4). Maka meski pada satu sisi memantik kemajuan ekonomi manusia, namun pada lain sisi juga memantik kemunduran kemanusiaan dan kehancuran sumber daya alam. Dengan melakukan riset perbandingan terhadap rasio kesenjangan di Chekoslovakia, Britania Raya, Jerman Barat, Amerika Serikat, dan Prancis, Attali dan Guillaume membuktikan bahwa pembangunanisme telah gagal memenuhi tujuan awalnya yakni kesejahteraan. Bahwa percepatan industri berbanding lurus dengan semakin merosotnya nilai-nilai kemanusiaan di samping munculnya berbagai problem kesehatan dan

sosial politik yang kronis (Attali & Guillaume, 1985: 115-6; Gorz, 2002: 90-105).

Kekeliruan paradigmatik atas pola pembangunan yang paling kentara adalah tujuan dari pembangunan itu sendiri: *high standard of living*, bukan *high quality of life*. Bahwa perhatian utama pembangunan cenderung hanya tertuju pada perbaikan standar kehidupan, khususnya standar material. Sementara aspek-aspek lain seperti kesejahteraan sosial, budaya, spiritual, kesehatan, dan keberlanjutan ekologis, minim bahkan nihil perhatian (Naess, 1989: 24-5). Untuk mencapai standar material yang tinggi, pembangunan akan sangat mengandalkan sumber daya alam yang juga mengikuti definisi standar kemajuan modern. Tambang utamanya—yang tentu saja tidak terbarukan (*unrenewable natural resources*). Pun sumber daya alam terbarukan seperti hutan dimanfaatkan, pertimbangan-pertimbangan keberlanjutan ekologis jangka panjang cenderung diabaikan bahkan sengaja dilupakan. Proyek-proyek pembangunan di beberapa negara berkembang justru terbukti jauh lebih menguras sumber daya alam dibanding mengurangi angka kemiskinan (Kothari dalam Shiva, 1997: xi). Sebuah kemerosotan pertumbuhan dalam pembangunan, dalam kiritk Illich dan Ezra Mishan, ketika nilai kerusakan yang ditimbulkan lebih tinggi dibanding kesejahteraan yang diperoleh tidak seberapa (Mizhan, 1975: 217-23).

Pembangunanisme, sejak awal kemunculannya bersetia pada logika biner. Logika yang membentuk polarisasi maju-terbelakang, modern-tradisional, pemodal-pekerja, manusia-alam. Dan yang paling sistemik adalah bineritas maskulin-feminin yang merujuk pada sentral-periferal atau wilayah laki-laki (*rational sphere of social production*) versus wilayah perempuan (*private precapitalist realism*). Karena keotentikan pembangunanisme yang lahir dari tradisi kolonialisme dan

imperialisme, maka dari awal laki-lakilah yang didorong untuk masuk ke wilayah utama (*center- public*). Sedangkan perempuan, dengan alasan ketubuhan dan produktivitasnya, ditempatkan pada wilayah pinggiran (*domestic-peripheral*) yang akhirnya menjadi kurang/tidak bernilai dengan standar ekonomi yang ditetapkan sistem pembangunan (Peet & Hartwick, 2015: 174-281).

Hingga kini, proses pembangunan masih menempatkan perempuan sebagai warga kelas dua di bawah laki-laki (Eckersley, 2001: 23-26; Babacan, 2009: 44-61; Bertaux &

Crabbe, 2007: 467-78; Phillips & Ilcan, 2014: 205-16). Bahkan dalam studi pembangunan dan kajian-kajian yang berkaitan dengannya, *East and Women* masih diidentikkan dengan isu periferal dan menjadi pakem objek pembangunan yang harus diberdayakan. Logika biner tersebut tidak hanya akan membuat perempuan tetap pada posisi *decay*-nya, tetapi juga akan memunculkan riak-riak dominasi baru. Koreksi terkini atas segala paradoks pembangunan ini datang dari ekofeminisme. Sebuah ideologi, gerakan sosial sekaligus filsafat yang tidak hanya mengkritisi secara total gagasan pembangunanisme, tetapi juga membaca ulang wacana politik, ekologis, dan spiritualitas dalam relasi antarmanusia dan antara manusia-nonmanusia.

Ekofeminisme: Kesadaran Etis Merawat Bumi

Istilah ekofeminisme pertama kali muncul pada tahun 1974 melalui tulisan Francoise d'Eaubonne yang berjudul *Le Feminisme ou la Mort*. Isu-isu feminisme dan ekologi saling berkaitan dan bersifat historis kausal. Maka, perempuan seringkali dihubungkan dengan alam baik secara konseptual, simbolik, juga linguistik (Tong, 2014: 260). Keterkaitan ini sangat dilatari oleh konstruksi masyarakat yang dibentuk oleh nilai,

kepercayaan, pendidikan, tingkah laku, yang kesemua variabel tersebut memakai kerangka kerja patriarki—kental justifikasi hubungan dominasi-subordinasi oleh laki-laki terhadap perempuan. Sebab perempuan diidentikkan kesifatannya dengan alam, maka ada kaitan yang sangat penting antara dominasi terhadap perempuan dan dominasi terhadap alam (Session, 1987: 105-25). Bahwa kehancuran ekologi adalah akibat pandangan dan praktik yang androsentris dan antroposentris. Bahkan sudah sejak lama para filsuf bersepakat, konsep dasar dari dominasi kembar terhadap alam dan perempuan adalah dualisme nilai dan hierarki nilai (Bloom, 1991; Griffin, 1978: 83-90).

Merawat kesadaran bahwa rekonstruksi terhadap alam yang rusak tidak dapat diselesaikan melalui pandangan etis praktis semata adalah *pe-er* ekofeminisme. Kuncinya, melalui pemahaman ontologis yang utuh dan mendalam tentang alam dan manusia yang mana tidak ada pemisahan di antara keduanya. Bahwa kita, manusia, terlepas dari apapun gender dan bagaimanapun seksualitas kita, adalah sama setara dan tidak berjarak dengan alam (ekuilibrium). Sedangkan permasalahan ontologis yang selama ini kurang dihayati dalam upaya pelestarian lingkungan justru terletak pada pemisahan relasi antara entitas manusia dan alam (disekuilibrium). Alam tetap dipandang sebagai objek komplementer dan terisolir. Sehingga upaya konservasi seringkali digiatkan memang demi kepentingan dan keberlangsungan manusia semata (antroposentris) (Leopold, 1949: 210). Padahal sejatinya, konsep konservasi adalah konsep merawat yang setara, yang mengusung kondisi harmoni antara manusia dan alam raya (Leopold, 2008: 585-90). Konsep harmoni pada diri ekofeminisme ini dilatari kepercayaan bahwa semua dan setiap manusia dengan segala aktivismenya merupakan bagian yang padu dan utuh dengan ekosistem baik lokal maupun global. Sedangkan kegagalan manusia untuk memahami dan menghormati (*respect*)

keterbatasan ekologis—lah yang menyebabkan krisis ekologi. Ketidakadilan sejak dalam pikiran yang ada dalam komunitas manusia inilah, sadar atau tidak, terefleksi ke dalam hubungan yang destruktif antara kemanusiaan dan dunia alamiah yang bukan manusia (*non-human natural world*).

Ekofeminisme menyadari betapa rupa dan potensi penindasan baik terhadap sesama manusia maupun oleh manusia terhadap nonmanusia itu ada. Dan begitu dekat. Maka sangat masuk akal bila pembahasan ekologi menjadi penting dalam wacana feminisme. Namun, dalam hal ini ekofeminisme global, bukan pada kesadaran mengembalikan manusia pada argumentasi kodrat yang selama ini lazim dilabelkan secara dikotomis sebagai kesifatan perempuan dan laki-laki. Melainkan menumbuhkan kesadaran feminis: keseimbangan dan kesetaraan. Ekofeminisme secara kuat lagi tajam mampu menerangkan bahwasanya kesetaraan gender bukan hanya akan menguntungkan perempuan, tetapi juga laki-laki—dan tentu saja termasuk gender ketiga lainnya. Bila alam/lingkungan mengalami krisis, maka semua manusia pada akhirnya akan menderita. Sebaliknya, bila alam/lingkungan asri lestari, maka semua manusia akan sejahtera.

Jika kehidupan adalah tema ekofeminisme, pun demikian kebebasan. Kebebasan yang didasari semangat penerimaan sekaligus penghayatan atas kealamian fisikalitas dan materialitas, serta karnalitas dan mortalitas manusia. Bagi Mies dan Shiva, transformasi haruslah bersifat material juga spiritual—global/menyeluruh. Maka hidup yang bersahaja adalah bentuk manifestasinya. Kesahajaan ini dirumuskan dalam **perspektif subsistensi**—sebagai kunci untuk menghentikan semua praktik dan sistem yang mengancam keberlangsungan hidup bumi (Mies, 2014: 297-322), sebagai berikut:

1. Tujuan dari kegiatan ekonomi bukan untuk menghasilkan tumpukan upah/keuntungan—yang berlandaskan keinginan (*desire*) yang tidak pernah berujung dan terpuaskan, melainkan untuk merawat kembali kehidupan. Kepuasan asasi manusia dilandasi pada nilai guna (*use-values*), bukan nilai gengsi (*purchase of commodities*). Terutama dalam pemenuhan pangan dan kebutuhan dasar lainnya, kemandirian (*self-provisioning*), swasembada, regionalitas, dan desentralisasi, adalah prinsip-prinsip utama ekonomi yang harus dipatuhi. Sedangkan sumber daya alam sifatnya digunakan (*used*), bukan dimanfaatkan secara buta (*exploited*).
2. Kegiatan ekonomi mesti didasari kesadaran:
(a) penghormatan kepada alam, memperlakukannya sebagai suatu realitas yang utuh dengan subjektivitasnya sendiri. Maka alam tidak dimanfaatkan untuk kepentingan profit, melainkan asas kebutuhan fundamental manusia; (b) penghormatan kepada sesama manusia, membangun hubungan dengan prinsip-prinsip seperti berbagi, timbal balik, mutualitas, solidaritas, reabilitas/kehandalan, dan kepedulian. Kedua prinsip ini penting sebagai bangun kesadaran demi kepentingan diri sendiri dan demi keberlangsungan hidup semua makhluk.
3. Memahami-menghayati partisipasi atau demokrasi akar rumput, bukan demokrasi representatif—tidak hanya sebatas politik keputusan *per se*, tetapi berkaitan dengan dengan wilayah-wilayah ekonomi, sosial, hingga teknologi. Artinya, semua dan setiap orang memiliki tanggung jawab politik, kesempatan, dan perhatian yang sama.
4. Menyadari bahwa permasalahan masyarakat kontemporer (patriarki, ketimpangan, keterasingan, kemiskinan), saling berhubungan dan kawin-mawin dengan permasalahan ekologi. Sehingga, dibutuhkan pendekatan penyelesaian yang sinergis dan multidimensional yang menyentuh setiap aspek tersebut.
5. Mengolaborasi ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengetahuan kontemporer dengan nilai-nilai kearifan, tradisi, dan kekuatan spiritual, sebagai upaya menuju keadilan sosial yang utuh.
6. Meleburkan batas-batas kerja dan main, ilmu pengetahuan dan seni, jiwa dan benda, spiritual dan material; menihilkan pandangan dualistik.
7. Memandang sumber daya alam seperti air, udara, tanah, sebagai kepemilikan bersama, bukan milik perseorangan/privatisasi-komersialisasi. Kesadaran ini akan menumbuhkan tanggung jawab bersama atas pelestarian dan regenerasi alam raya.
8. Setiap insan manusia mesti menumbuhkan kebajikan-kebajikan feminitas tradisional seperti kepedulian, simpati, perawatan, dan sebagainya yang didasari perspektif subsistensi. Dan yang paling utama adalah kesadaran untuk hidup bersahaja yang tidak berlebih-lebihan demi kesejahteraan sosial bersama.

Pada fase bangun etika inilah ekofeminisme menawarkan cara pandang, basis, dan program aksi yang global dan unik. Bangun etika yang tidak lagi sekadar memandang manusia sebagai makhluk berjenis kelamin perempuan atau laki-laki *an sich*, melainkan sebagai tubuh, sebagai jiwa, sebagai kosmos, yang memiliki cinta kasih dan peran terhadap semua dan setiap makhluk semesta. Dalam diri ekofeminisme global, terkandung cara pandang yang holistik, pluralistik, dan inklusif, yang lebih memungkinkan setiap manusia menjalin relasi yang damai.

Ekofeminisme menyadari betapa rupa dan potensi penindasan baik terhadap sesama manusia maupun oleh manusia terhadap nonmanusia itu ada. Dan begitu dekat. Maka sangat masuk akal bila pembahasan ekologi menjadi penting dalam wacana feminisme. Namun, dalam hal ini ekofeminisme global, bukan pada kesadaran mengembalikan manusia pada argumentasi kodrat yang selama ini lazim dilabelkan secara dikotomis sebagai kesifatan perempuan dan laki-laki. Melainkan menumbuhkan kesadaran feminis: keseimbangan dan kesetaraan. Ekofeminisme secara kuat lagi tajam mampu menerangkan bahwasanya kesetaraan gender bukan hanya akan menguntungkan perempuan, tetapi juga laki-laki—dan tentu saja termasuk gender ketiga lainnya. Bila alam/lingkungan mengalami krisis, maka semua manusia pada akhirnya akan menderita. Sebaliknya, bila alam/lingkungan asri lestari, maka semua manusia akan sejahtera.

Perempuan, Tanah, dan Jejak Kerakusan

Belum lama ini, United Nations Development Programme (UNDP) merilis laporan tahunan *Human Development Report 2016* dengan temuan-temuan kunci yang tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Tentang banyaknya eksklusi terhadap perempuan, minimnya kebijakan yang adil-setara bagi kelompok minoritas, dan masih luasnya kesenjangan antara masyarakat rural dengan masyarakat urban di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Ketiga kelompok ini—perempuan, kelompok minoritas, dan masyarakat rural terpencil—rentan mengalami deprivasi baik secara terbuka maupun tersembunyi. Secara global, satu dari tiga orang masih hidup di bawah level standar Indeks Pembangunan Manusia (UNDP, 2016).

Sementara di Indonesia, tercatat 140 juta orang masih hidup dengan kurang dari Rp20.000 per harinya (UNDP Indonesia, 2016).

Namun demikian bila dikaji lagi secara radikal, bencana-bencana tersebut—kemiskinan, kesenjangan, kekerasan, hingga bencana-bencana alam yang disebutkan sebelumnya—kawin-mawin dengan dosa-dosa ekologis manusia. Cacatnya perizinan pembangunan infrastruktur skala besar, pengabaian tata ruang dan lingkungan hidup, serta lemahnya penegakan hukum adalah variabel yang tidak bisa dikesampingkan. Hal tersebut memberi efek domino yang nyata pada makin liar dan masifnya kawasan alih fungsi, kawasan hulu-hilir yang rusak, sehingga daya dukung dan daya tampung lingkungan semakin mengalami degradasi (TEMPO.CO, 2016). Fakta ironisnya, kesemuanya dilakukan dengan cara perampasan tanah, hingga kriminalisasi warga dan aktivis tanpa penegakan hukum yang serius oleh negara, atas nama kemajuan dan pembangunan. Hal ini belum termasuk data tahun-tahun terakhir ekspansi sektor pariwisata, penebangan ilegal, tambang, dan pertanian-industri skala besar yang telah menyebabkan berkurangnya luas hutan dan daerah resapan air (Savitri, 2013b; Dwicipta & Ardianto, 2015; Saturi, 2015; Nugroho, 2015).

Paradigma modern via pembangunanisme tidak hanya menempatkan manusia perempuan sebagai manusia kedua, tetapi juga mereduksi alam sebagai entitas eksploitasi. Penebangan pohon, pertambangan, dan pengubahan hutan hujan tropis menjadi perkebunan monokultur industri seperti gula, teh, kopi, tembakau, sawit misalnya, telah mengubah lanskap identitas ekologi Bumi Pertiwi saat ini. Bagaimana varietas vegetasi tertentu, hewan tertentu, yang dianggap lebih menguntungkan daripada yang lain, dibudidayakan secara monokultur yang kemudian mengancam diversifikasi pangan dan

data keragaman hayati-hewani yang menopang keseimbangan alam. Alam tidak lagi dipandang sebagai makhluk yang sama setara hak hidupnya dengan manusia. Pengalaman alam sebagai objek eksploitasi ini menjelaskan bagaimana agrikultur, pertanian, perkebunan, hingga relasi ekologi dan sosial telah tergenderkan ke dalam hierarki kuasa patriarki. Realitas tentang ketimpangan relasi ini secara empiris terjadi di beberapa wilayah di Indonesia dengan satu alasan yang sama: atas nama pembangunan.

Kasus Kendeng

Narasi Kendeng adalah narasi perlawanan sekaligus narasi penyelamatan. Pegunungan Kendeng teridentifikasi tidak hanya darurat ekologi tetapi juga darurat agraria. Dikatakan darurat ekologi karena kawasan yang menjadi target tambang merupakan kawasan lindung geologi yang seharusnya dikonservasi (Wacana & dkk., 2015: 1-27); sementara dikatakan darurat agraria karena pada praktiknya pabrik semen berdiri di atas lahan-lahan yang sama sekali belum dibebaskan (Batubara, 2015: 28-34).

Pada pertengahan Maret 2017 baru-baru ini, tidak kurang dari 50 orang petani perempuan dan petani laki-laki Pegunungan Kendeng Utara melakukan aksi pasung semen dengan menyemen kaki di depan istana negara yang berlangsung selama delapan hari tanpa jeda. Aksi solidaritas ini dilakukan dalam rangka menuntut pembatalan pendirian pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng. Kasus Kendeng bermula dari rencana pembangunan pabrik semen di kawasan Pegunungan Kendeng tepatnya Kabupaten Pati pada tahun 2006. Jatuh bangun upaya penolakan dan perlawanan masyarakat Pati terus dilakukan hingga akhirnya izin usaha pertambangan pun dibatalkan. Namun kondisi tidak bertambah baik sebab perusahaan mengalihkan lokasi pertambangan (masih di kawasan Pegunungan Kendeng) ke

kawasan Gunung Watuputih, Kabupaten Rembang, melalui Keputusan Bupati Rembang tentang pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) eksplorasi tras pada 14 Oktober 2010. Adapun alasan-alasan penolakan pendirian pabrik semen adalah: (1) rakyat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tentang pendirian pabrik; (2) kawasan pegunungan Kendeng adalah kawasan kars kelas satu; (3) tidak diperhatikannya kondisi geografis dan sosiologis; (4) terdapat prosedur hukum yang dilanggar.

Bila kita melihat ke dalam lintasan kultural yang membangun masyarakat Kendeng, maka kita akan mendapati relasi yang begitu erat antara manusia dan alam. Masyarakat Kendeng percaya bahwa Pulau Jawa dibagi menjadi tiga pengibaran: Jawa Barat sebagai kepala, Jawa Tengah sebagai perut, dan Jawa Timur sebagai kaki. Jawa Tengah sebagai perut bermakna bahwa Jawa Tengah adalah lumbung padi se-Nusantara yang berpusat di Pegunungan Kendeng. Pengibaran ini menjelaskan banyak hal terkait kelekatan relasional antara warga Kendeng dengan Ibu Bumi. Maka merawat tanah sama halnya dengan merawat tubuh. Apabila tanah disakiti, maka tubuh akan tersakiti pula. Hasrat etis warga Kendeng inilah yang membuat mereka tidak pernah kehabisan energi untuk terus berjuang menyelamatkan Pegunungan Kendeng dari aktivitas pertambangan korporasi.

Kasus Mollo

Mollo merupakan salah satu wilayah ujung timur Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT. Kata Mollo sendiri memiliki arti sumber yang diyakini setara dengan seorang ibu, ujung pangkal seluruh proses kehidupan. Secara geografis, penamaan ini didukung dengan letak Mollo yang berada di ujung timur pegunungan yang mana airnya mengalir hingga daerah Timor Leste. Masyarakat Mollo percaya bahwa Mollo

merupakan pusat keseimbangan ekosistem beserta seluruh kehidupan yang bergantung padanya. Hal ini menjadikan kepedulian terhadap Mollo tidak sekadar kepedulian administratif, melainkan kepedulian spiritual tentang keseimbangan alam (Maemunah, 2015: 8-14).

Secara kultural, masyarakat Mollo telah membangun pertahanan kolektif melalui sistem nilai spiritual dan keluhuran. Maka wajar bila izin penambangan batu marmer yang dikeluarkan pada tahun 1980 menghadirkan reaksi yang tidak biasa. Aktivitas penambangan yang tidak pernah melalui kesepakatan bersama seluruh warga terdampak ini dianggap sebagai keputusan yang menciderai kepercayaan warga. Faktanya, gagasan penambangan lebih banyak memberi dampak kerusakan lingkungan, yang mana bertolak belakang dengan nilai-nilai penjagaan alam yang sejak turun-temurun mereka hayati. Berbagai kerusakan alam yang muncul kemudian serta risiko-risiko lain yang ditimbulkan, memberi dampak yang sangat besar terhadap perempuan Mollo. Mereka menjadi kehilangan kestabilan dalam merawat dan mendayagunakan terutama dalam hal produktivitas pangan. Hal ini terkait erat dengan sistem nilai yang dijadikan pedoman masyarakat Mollo, bahwa perempuan memiliki tanggung jawab besar dalam pengolahan lahan, penyimpanan, dan pengaturan konsumsi pangan; sementara laki-laki bertanggung jawab untuk membuka lahan dalam aktivitas pertanian (Asriani, 2015: 127-39; Maemunah, 2015: 46-53).

Bagi masyarakat adat Mollo, alam bagaikan tubuh manusia perempuan. Mereka menghayati air bagaikan darah, tanah bagaikan daging, hutan bagaikan kulit, dan batuan bagaikan kerangka badan. Maka menghancurkan itu semua sama dengan menghancurkan tubuh perempuan. Nilai tersebut dikuatkan dengan fakta bahwa perempuan Mollo adalah pihak

yang paling pertama terpapar dampak kerusakan lingkungan. Satu contoh, perempuan merupakan pihak yang paling sering dan paling banyak berhubungan dengan air karena peran-peran domestik dan reproduksinya. Ketika haid, perempuan membutuhkan banyak air; ketika melahirkan, perempuan membutuhkan banyak air; ketika mengurus anak dan pangan keluarga, perempuan tentu membutuhkan banyak air. Sehingga celaknya, ketika air tercemar maka perempuanlah yang paling rentan terkena dampak, terutama alat-alat reproduksinya. Risiko-risiko serupa tidak hanya berlaku pada perempuan Mollo atau perempuan Kendeng, tetapi juga berlaku di setiap kawasan yang dijadikan lahan pertambangan, perindustrian, termasuk perindustrian perkebunan monokultur yang menggunakan sistem pertahanan artifisial/pestisida.

Penutup

Dari segi demografi, pertambangan yang merupakan wajah motorik pembangunan, menjadi satu faktor penting terjadinya percepatan urbanisasi yang mengakibatkan migrasi besar-besaran laki-laki desa ke kota. Sehingga, akses perempuan pada lahan, sawah, perkebunan, dan hutan desa mengalami frekuensi yang tidak lazim dan tidak sehat (*feminization of land*). Sebab, feminisasi tanah biasanya dibarengi dengan ancaman eksploitasi masif tambang atas sumber daya setempat. Tanah, lahan, dan kesuburannya mengalami ketidakseimbangan seperti sebelumnya ketika pembagian peran antara perempuan dan laki-laki masih berlangsung secara tradisional yang belum terkontaminasi kepentingan kapitalisme pembangunan. Situasi inilah yang terjadi di Pegunungan Kendeng dan Pegunungan Mollo. Lelaki menjadi buruh kasar di kota-kota dan mendapatkan paparan polusi khas kota— karbon, air tak bersih, ruang tak layak, dan sebagainya. Sedang perempuan di sawah,

perkebunan, dan hutan desa yang terkena tambang terpapar polusi yang tak kalah mengerikan—merkuri dari tambang, pencemaran air, dan sebagainya.

Maka dapat kita sadari bahwa upaya-upaya penyelamatan lingkungan yang melampaui sekat-sekat biner kelamin bukanlah suatu utopia semata. Sebab semua dan setiap individu memiliki risiko terkena dampak yang sama atas kerusakan lingkungan, maka semua dan setiap individu itu pula sama bertanggung jawabnya atas keselamatan bumi. Sehingga akan sangat mungkin bahwa etika ekofeminisme sebagai etika kepedulian (*ethics of care*) dan etika kehidupan dengan pandangan global-terbuka, mampu dihayati dan diperankan baik oleh manusia perempuan maupun manusia laki-laki. Pada prinsipnya, ekofeminisme tidak dimaknai secara sempit sebagai perkawinan antara nilai-nilai ekologis dan feminisme. Melampaui itu, ekofeminisme merupakan bangun nilai dan bangun moral yang menentang secara tegas paradigma-daya-laku yang dedukstrif, diskriminatif, menindas, eksploitatif, dan dikotomis baik antarsesama manusia maupun antara manusia dan nonmanusia. Demi kehidupan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Asriani, D. D. (2015). Perempuan Merawat Tubuh & Alam: Aleta Baun, Paham Nifu & Pegunungan Mutis. In D. Candraningrum & A. I. R. Hunga (Ed.), *Ekofeminisme III: Tambang, Perubahan Iklim & Memori Rahim*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Attali, J., & Guillaume, M. (1985). *L'Anti-Economique*. Paris: Presses Universitaires de France - PUF.
- Babacan, H. (2009). Women and Development. In R. C. Elliot (Ed.), *Institutional Issues Involving Ethics And Justice* (Vol. 2, hal. 44–61). Oxford: Eolss Publisher/UNESCO.
- Batubara, B. (2015). Izin Lingkungan PT Semen Indonesia di Rembang Harus Dibatalkan Demi Hukum. In Dwicipta & H. T. Ardianto (Ed.), *Rembang Melawan: Membongkar Fantasi Pertambangan Semen di Pegunungan Kendeng*. Yogyakarta: Literasi Press & Ladang Kata.
- Bearfield, D. A. (2009). Equity at the Intersection: Public Administration and the Study of Gender. *Public Administration Review*, 69(3), 383–386. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2009.01985.x>.
- Bertaux, N., & Crable, E. (2007). Learning About Women. Economic Development, Entrepreneurship And The Environment In India: A Case Study. *Journal of Developmental Entrepreneurship (JDE)*, 12(4), 467–478. <https://doi.org/10.1142/S1084946707000757>.
- Bloom, A. (1991). *The Republic of Plato* (2nd ed.). New York: Basic Books.
- Burnier, D. (2005). Bringing Gender into View. *Administrative Theory & Praxis*, 27(2), 394–400. Diambil dari <http://www.jstor.org/stable/25610736>
- Dwicipta, & Ardianto, H. T. (Ed.). (2015). *Rembang Melawan: Membongkar Fantasi Pertambangan Semen di Pegunungan Kendeng*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Eckersley, R. (2001). Ecofeminism and Environmental Democracy: Exploring the Connections. *Women and Environments International Magazine*, 52/53, 23–26. Diambil dari <http://search.proquest.com/docview/211630399?accountid=25704>.
- Fakih, M. (2013). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: INSIST Press & Pustaka Pelajar.
- Goetz, A. M. (1994). From Feminist Knowledge to Data for Development: The Bureaucratic Management of Information on Women and Development. In S. Davies (Ed.), *IDS Bulletin; Knowledge is Power? The Use and Abuse of Information in Development* (Vol. 25, hal. 27–36). Brighton: Institute of Development Studies.

- Gorz, A. (2002). *Ekologi dan Krisis Kapitalisme*. Yogyakarta: INSIST Press.
- Griffin, S. (1978). *Woman and Nature: The Roaring Inside Her*. New York: Harper & Row.
- Keraf, S. A. (2010). *Krisis dan Bencana Lingkungan Hidup Global*. Yogyakarta: Kanisius.
- Leopold, A. (1949). *A Sand County Almanac and Sketches Here and There*. London & New York: Oxford University Press.
- Leopold, A. (2008). The Land Ethic. In J. Cottingham (Ed.), *Western Philosophy: An Anthology* (2nd ed., hal. 585–590). Oxford: Blackwell Publisher.
- Maemunah, S. (2015). *Mollo, Pembangunan dan Perubahan Iklim*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Mies, M. (2014). The Need for a New Vision: The Subsistence Perspective. In *Ecofeminism* (hal. 297–322). London: Zed Books.
- Miller, K. (2009). Public Policy Dilemma—Gender Equality Mainstreaming in UK Policy Formulation. *Public Money & Management*, 29(1), 43–50. <http://dx.doi.org/10.1080/09540960802617350>.
- Mizhan, E. (1975). *The Costs of Economic Growth*. New Zealand: Penguin Books.
- Diambil dari <http://ww1.bookzz.org/book/1000502/ece84e>.
- Moore, J. W. (2015). Cheap Food and Bad Climate: From Surplus Value to Negative Value in the Capitalist World-Ecology. *Critical Historical Studies*, (Spring), 1– 43. <https://doi.org/10.1086/681007>.
- Muthmainnah, L. (2008). Kritik Feminis terhadap Developmentalisme. *Jurnal Filsafat*, 18(3), 315–331. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22146/jf.3530>.
- Naess, A. (1989). *Ecology, Community and Lifestyle: Outline of an Ecosophy*. Cambridge University Press. Cambridge: Cambridge University Press.
- Nisbet, R. A. (2009). *History Of The Idea Progress*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Nugroho, A. C. (2015). Bertani di Atas Pasir Pesisir Pantai Selatan Yogyakarta: Studi Kasus Perempuan Melawan Tambang Pasir Besi. In D. Candraningrum & A. I. R. Hunga (Ed.), *Ekofeminisme III: Tambang, Perubahan Iklim & Memori Rahim* (hal. 103–123). Yogyakarta: Jalasutra.
- Ollenburger, J. C., & Moore, H. A. (1998). *A Sociology of Women: Intersection of Patriarchy, Capitalism, and Colonization* (2nd ed.). Cambridge: Pearson Publishing.
- Park, S.-Y. (2015). Social Conflicts and Hegemonic Articulation on the Saemangeum Reclamation Project in South Korea. *Development and Society*, 44(1), 1–27. Diambil dari <http://www.jstor.org/stable/deveandsoci.44.1.1>.
- Peet, R., & Hartwick, E. (2015). *Theories of Development: Contentions, Arguments, Alternatives* (3rd ed.). New York: The Guilford Press.
- Phillips, L., & Ilcan, S. (2014). Domesticating Spaces in Transition: Politics and Practices in the Gender and Development Literature, 1970-99. *Anthropologica*, 42(2), 205–216. Diambil dari <http://www.jstor.org/stable/25605988>.
- Pillay, D. (2015). The Global Economic Crisis and the Africa Rising Narrative. *Africa Development*, 40(3), 59–75. Diambil dari <http://www.jstor.org/stable/afrdevafrdev.40.3.59>.
- Preston, P. W. (1986). *Making Sense of Development*. London: Routledge.
- Ramdhon, A. (2013). Perempuan Penyanga Kota: Marginalisasi dan Eksploitasi. In D. Candraningrum (Ed.), *Ekofeminisme: Dalam Tafsir Agama, Pendidikan, Ekonomi, dan Budaya* (Seri 1, hal. 209–218). Yogyakarta: Jalasutra.

- Rismawati, S. D. (2012). Partisipasi Perempuan dalam Pusaran Pembangunan Daerah (Telaah Kritis atas Kendala dan Solusi). *Muwazah, Jurnal Kajian Gender*, 4(1), 56–63. Diambil dari <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/152/434>.
- Rostow, W. W. (1990). *The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto* (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Saturi, S. (2015). Perempuan Adat dan Hak Ulayat dalam Konflik Agraria: Kajian Ekofeminisme. In D. Candraningrum & A. I. R. Hunga (Ed.), *Ekofeminisme III: Tambang, Perubahan Iklim & Memori Rahim* (hal. 279–296). Yogyakarta: Jalasutra.
- Savitri, L. A. (2013). Politik Rampas Ruang; Tantangan Gerakan Sosial. In *NGO's Strategic National Dialogue*. Jakarta.
- Session, G. (1987). The Deep Ecology Movement: A Review. *Environmental Review: ER*, 11(2), 105–125. <https://doi.org/10.2307/3984023>.
- Shiva, V. (1997). *Bebas dari Pembangunan: Perempuan, Ekologi, dan Perjuangan Hidup di India*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- TEMPO.CO. (2016, November 24). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). *Potensi Bencana Hidrometeorologi Meningkat di 2017*. Jakarta. Diambil dari <https://m.tempo.co/read/news/2016/11/24/173822688/bnpb-potensi-bencana-hidrometeorologi-meningkat-di-2017>.
- Tong, R. (2014). *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction* (4th ed.). Colorado: Westview Press.
- United Nations Development Programme (UNDP). (n.d.). United Nations Development Programme (UNDP) in Indonesia. Diambil dari <http://www.id.undp.org/content/indonesia/id/home/presscenter/pressreleases/2017/03/22/indonesia-s-human-development-index-rises-but-inequality-remains-/>.
- United Nations Development Programme (UNDP). (2016). *Human Development Report 2016: Human Development for Everyone*. New York. Diambil dari <http://report.hdr.undp.org/>.
- Wacana, P., & dkk. (2015). Kajian Potensi Kawasan Karst Kendeng Utara Pegunungan Rembang Madura Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. In Dwicipta & H. T. Ardianto (Ed.), *Rembang Melawan: Membongkar Fantasi Pertambangan Semen di Pegunungan Kendeng*. Yogyakarta: Literasi Press & Ladang Kata.
- WALHI. (2015). *Menagih Janji Menuntut Perubahan. Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2015*. Jakarta. Diambil dari <http://goo.gl/A1tdVQ>.
- WALHI. (2016). *Tinjauan Lingkungan Hidup 2016*. Jakarta. Diambil dari <http://www.walhi.or.id/2016/12/22/outlook-2016-tujuan-lingkungan-hidup/>.